

Vigora

WARTA UTAMA

Capt Meki F Nawipa: Guru Anak-anak Papua & Bangsa Indonesia

**POLICY BRIEF UNTUK
PAPUA TENGAH**

**POLICY BRIEF UNTUK
JAWA BARAT**

**ERC INDONESIA
VISIT PAPUA**

**IMAJINASI PENDIDIKAN
INDONESIA**

**DISKUSI PUBLIK:
PAPUA, PENDIDIKAN
DAN KESEJAHTERAAN**

ERC Visit Papua Tengah

DALAM RANGKA SOSIALISASI BEASISWA SMK
SABTU, 13 JULI 2024





Pelindung : Ai Nurhidayat

Pembina : Asep Mulyana

Penanggungjawab/ Pemimpin Redaksi :

Nurul Hidayat

Redaktur: Syukron Mahmudi

Penyunting/ Editor: Afiq Naufal

Desain Grafis: Karlos

Alamat Redaksi:

Jl Al Munawaroh No 11 Jagakarsa,

Ciganjur, Jakarta Selatan

Ig : @ercindonesia

FB: Erc Indonesia

Tiktok: ercindonesia

Email: ecindonesia@gmail.com

Kontak: 081932410966



Salam Cerdas...

Tahun 2024 adalah tahun yang penuh dinamika dan semangat baru. Di tengah masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung, dunia pendidikan pun ikut bergerak dan berbenah. Kebijakan-kebijakan mulai bergeser, arah pembangunan diperbarui, dan tentu saja harapannya tetap satu: pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna bagi seluruh anak bangsa.

Dalam edisi Vigora kali ini, kami mengajak pembaca menyusuri jejak perubahan dan refleksi sepanjang tahun 2024. Kami rangkum berbagai isu penting di ranah pendidikan yang menjadi sorotan nasional, kami ulas pula bagaimana ERC berkiprah, terlibat, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendampingi proses transformasi ini. Dari riset kebijakan, pendampingan kelembagaan, hingga inovasi program bersemangat kedewasaan yang semuanya terangkum dalam sajian yang kami kemas dengan semangat edukatif, inspiratif, dan tentu saja menggugah pikiran.

Selamat membaca. Semoga setiap halaman dalam majalah ini mampu menjadi bahan bakar semangat untuk terus mencintai dunia pendidikan dan ikut menyemai perubahan yang bermakna.

Salam hangat dari saudaramu:
Nurul Hidayat



DAFTAR ISI

04 SERBA-SERBI PENDIDIKAN 2024

Kumpulan isu pendidikan teratas
selama 2024

06 DATA STATISTIK

Data jumlah guru tingkat dasar
menengah

08 DATA STATISTIK

Gambaran umum keadaan
sekolah dasar Indonesia

10 ARTIKEL PENDIDIKAN

Imajinasi Pendidikan Indonesia

11 ARTIKEL PENDIDIKAN

Apakah pendidikan kita diciptakan
diskriminatif? Tidak sama sekali!

14 TOKOH

Capt Meki F Nawipa: Guru Anak-anak Papua dan Bangsa Indonesia

16 POLICY BRIEF

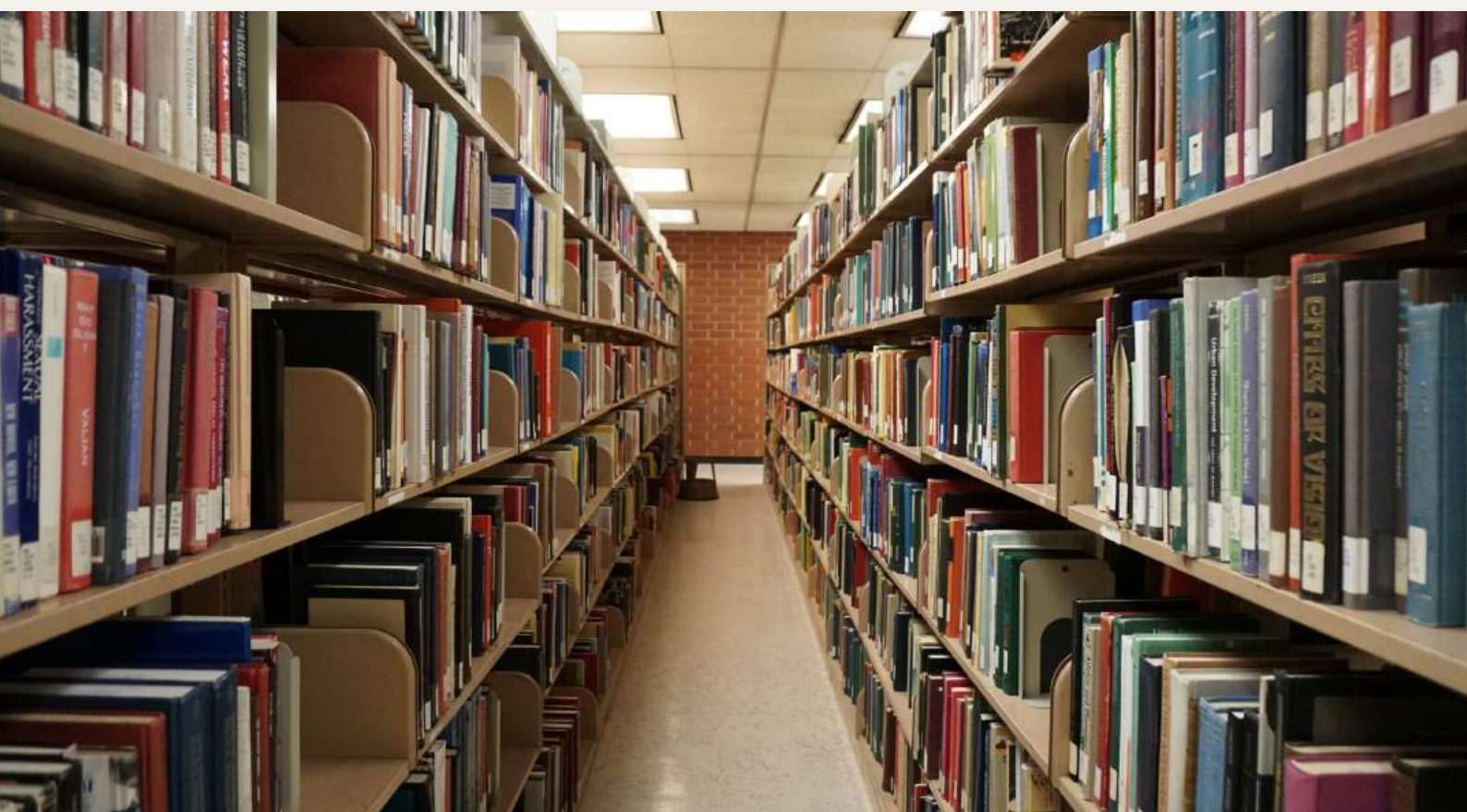
Papua Tengah

18 POLICY BRIEF

Jawa Barat

20 MAKNA VIGORA

Asal kata Vigora berikut makna filosofisnya



Serba-serbi Pendidikan 2024





Sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami lonjakan signifikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 573 kasus kekerasan, meningkat dari 285 kasus pada tahun sebelumnya. Jenis kekerasan yang terjadi mencakup fisik, verbal, hingga kekerasan seksual, menunjukkan bahwa lingkungan sekolah masih belum sepenuhnya aman bagi peserta didik.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus pembagian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama terkait kesiapan siswa dalam mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).



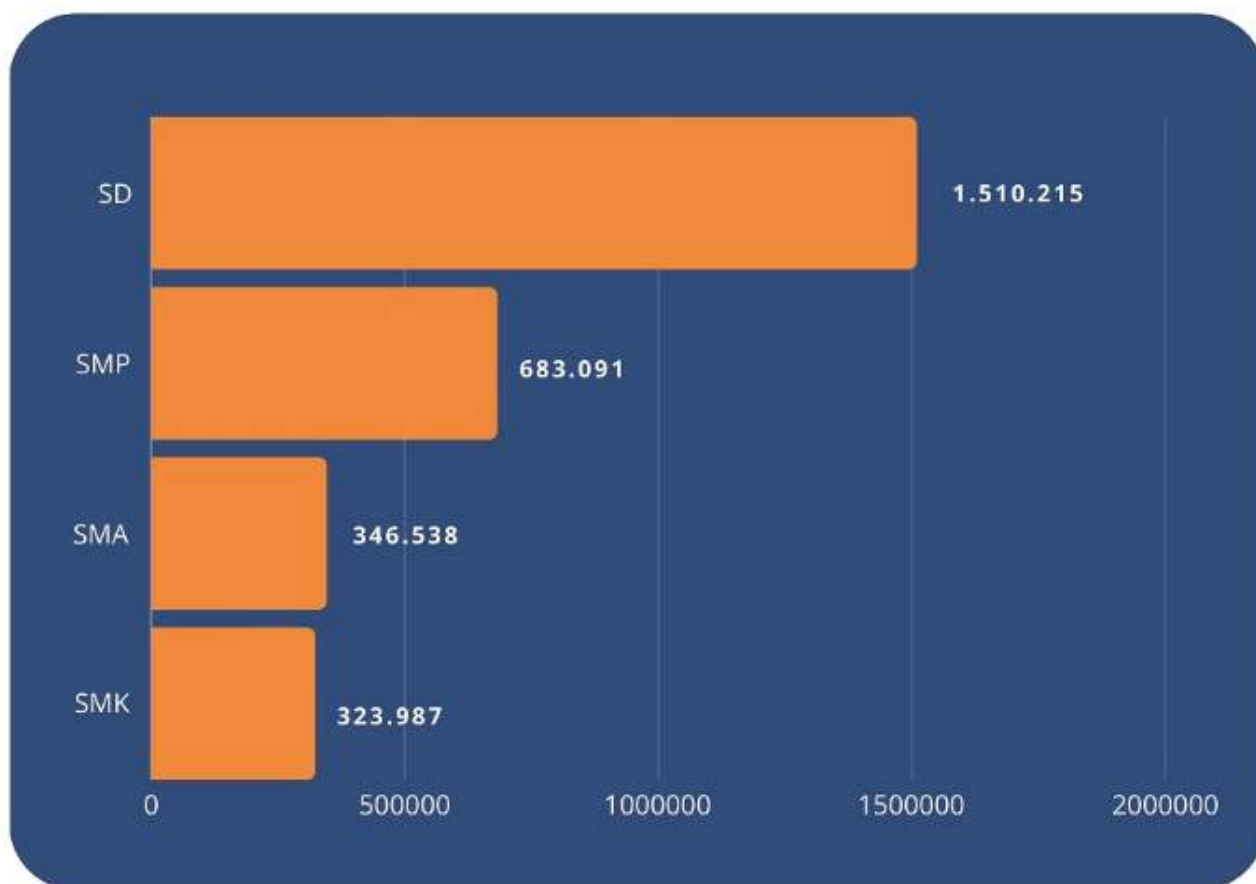
Rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri dibatalkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun, terdapat kemungkinan kenaikan UKT pada tahun 2025, tergantung pada evaluasi dan kondisi ekonomi.



Dalam kabinet baru Presiden Prabowo Subianto, Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Perubahan ini bertujuan untuk lebih fokus dalam pengelolaan masing-masing bidang, namun juga menimbulkan tantangan koordinasi antar lembaga.



DATA JUMLAH GURU TINGKAT DASAR-MENENGAH



Source: dapodik

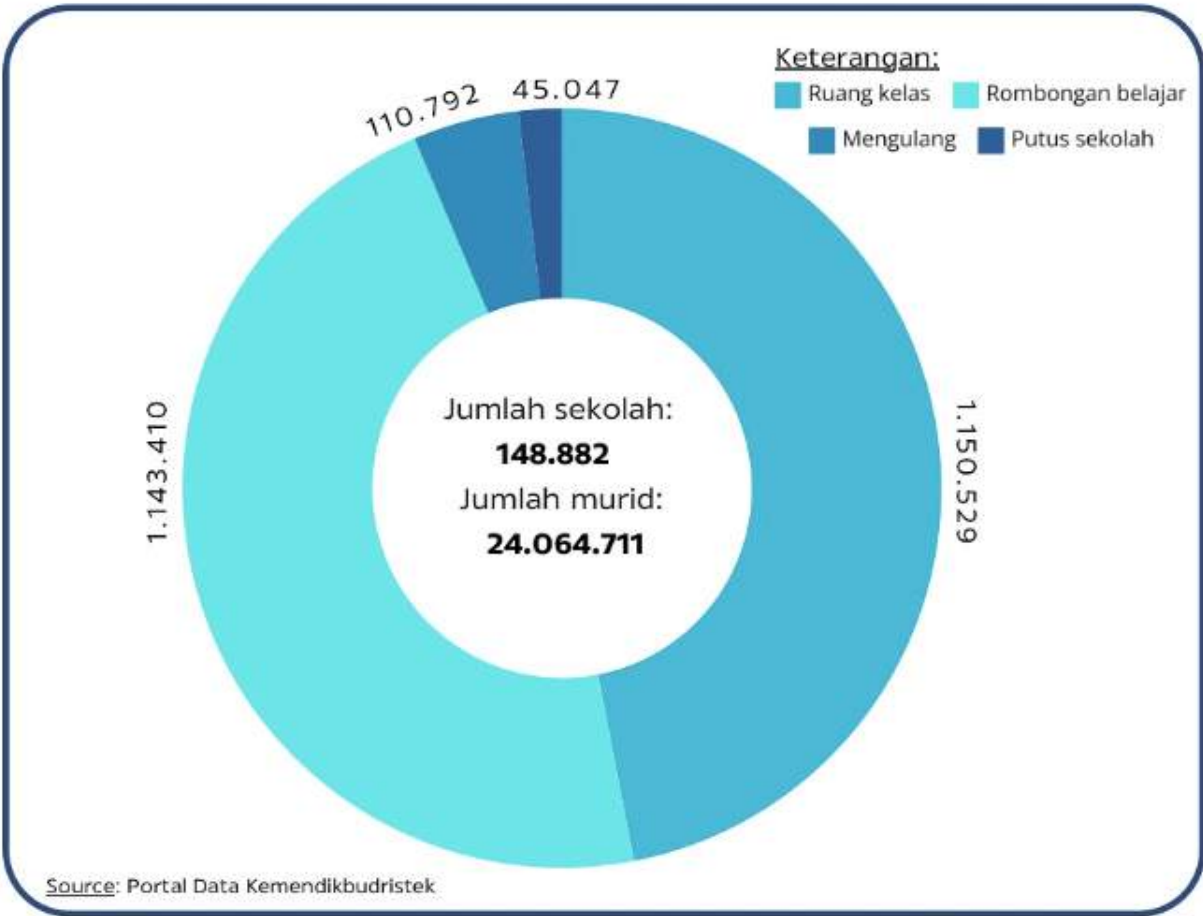
[ercindonesia](#) [ercindonesia](#)

Data spesial di moment hari guru, tercatat jumlah guru di Indonesia tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah lebih dominan pada tingkat Pendidikan Dasar. Jika dalam ilmu ekonomi, tingkat supply and demand harus seimbang, yang berarti jika supply guru banyak maka demand, murid juga banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa murid tingkat Pendidikan Dasar lebih banyak daripada murid tingkat Pendidikan Menengah.



GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH DASAR INDONESIA

TAHUN AJARAN 2023/2024



[ercindonesia](#) [ercindonesia](#)

Education, Research, and Consulting (ERC) merilis data base Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar di Indonesia Tahun Ajaran 2023/2024. Data tersebut diperoleh melalui website Portal Data Kemendikbudristek. Dalam hal ini, tercatat bahwa presentase putus sekolah berada di 1,8% murid dari 100% murid se-Indonesia. Sedangkan presentase murid mengulang setara 4,5% dari 100% murid di Indonesia.

Diskusi Publik:

Papua, Pendidikan & Kesejahteraan





Imajinasi Pendidikan Indonesia

AFIQ NAUFAL, AKTIVIS PENDIDIKAN



Pendidikan di Indonesia adalah salah satu ironi terbesar yang kita miliki. Sebuah sistem yang dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, justru sering menjadi penghambat bagi potensi terbaik masyarakatnya. Kita melihatnya setiap hari—bangunan sekolah yang megah di beberapa kota besar berdiri kontras dengan ruang kelas reyot di pedalaman. Kurikulum yang digembar-gemborkan sebagai solusi sering kali menjadi alat lain untuk membingungkan guru dan siswa. Angka-angka terus dibanggakan: peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah hingga 91,27% pada 2022, peningkatan anggaran hingga 20% dari APBN setiap tahun. Namun, di balik semua itu, kita harus bertanya: Untuk apa?

Apa yang sebenarnya kita cari dalam pendidikan ini? Apakah hanya sekadar statistik yang membuat laporan tahunan pemerintah terlihat cantik? Ataukah ada visi besar yang sesungguhnya ingin kita wujudkan?

Krisis pendidikan kita bukan hanya soal teknis—tidak cukup guru berkualitas, akses internet yang minim di daerah terpencil, atau infrastruktur yang tak memadai. Krisis ini adalah krisis arah. Pendidikan di Indonesia kehilangan kompasnya. Kita tidak tahu ke mana sebenarnya kita ingin membawa generasi muda ini. Kita berbicara tentang mencetak manusia yang "unggul," "kompetitif," dan "berdaya saing global," tetapi lupa bertanya: apakah manusia unggul ini masih mengenal dirinya sendiri? Apakah mereka masih memiliki keterikatan dengan akar budayanya?

Indonesia, dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, adalah salah satu negara paling beragam di dunia. Namun, pendidikan kita justru sering menjadi alat homogenisasi. Alih-alih merayakan keberagaman, sistem kita mendikte cara berpikir dan cara hidup yang seragam. Anak-anak Bugis, Jawa, Sunda, atau Minang diajarkan sejarah dengan perspektif yang sama, seolah-olah pengalaman mereka tidak berarti. Mereka dipaksa menghafal, tetapi tidak pernah diminta untuk memahami.

Kita memiliki mata pelajaran sejarah dan kebudayaan, tetapi semuanya diajarkan dalam narasi yang dangkal dan seringkali bias. Siswa mengenal tokoh-tokoh seperti Kartini, Diponegoro, dan Bung Karno, tetapi jarang mengenal tokoh lokal dari tanah mereka sendiri. Apa yang seharusnya menjadi kesadaran budaya berubah menjadi pelajaran formal yang kering, tanpa makna. Tidak heran jika banyak generasi muda merasa terputus dari akar tradisinya.

Selain krisis identitas, pendidikan kita juga menghadapi masalah serius dalam bidang penelitian. Data UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,23% dari PDB untuk penelitian dan pengembangan (R&D)—jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (1,44%) atau Singapura (2%). Ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak memprioritaskan inovasi sebagai bagian dari pendidikan.

Universitas-universitas kita, yang seharusnya menjadi pusat pengetahuan dan kreativitas, justru terjebak dalam siklus administratif. Dosen sibuk mengejar angka kredit untuk kenaikan pangkat, sementara mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi bangsa ini. Penelitian sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa orientasi pada visi besar yang bisa membawa perubahan.

Krisis terbesar dari semua ini adalah hilangnya visi. Pendidikan kita seolah hanya menjadi respons terhadap tekanan global, tanpa arah yang jelas. Kita ingin menjadi negara maju, tetapi tidak tahu apa artinya maju itu sendiri. Kita ingin bersaing di pasar global, tetapi lupa bertanya, apakah kita memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan?

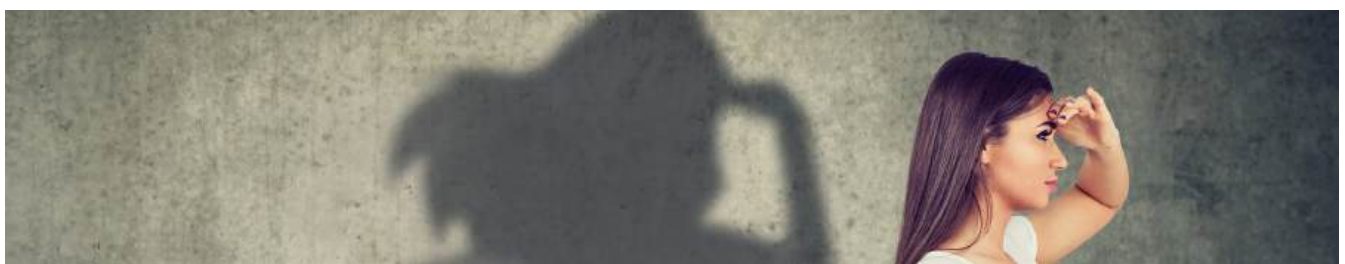
Negara-negara seperti Finlandia atau Jepang tidak hanya membangun sistem pendidikan yang unggul; mereka membangunnya berdasarkan identitas mereka. Finlandia dengan pendekatan personalisasi dan keseimbangan hidup, Jepang dengan budaya disiplin dan kerjasama. Sementara itu, kita terjebak dalam mengadopsi model dari luar, tanpa menyesuaikannya dengan konteks kita.

Apakah Indonesia memiliki visi besar dalam pendidikan? Jika ada, mengapa itu tidak tercermin dalam kebijakan yang dijalankan? Mengapa kita terus berbicara tentang revolusi industri 4.0 atau kecerdasan buatan, tetapi tidak pernah menempatkan nilai-nilai lokal dalam percakapan itu? Apakah kita hanya ingin menjadi penonton di panggung global, atau berani menciptakan cerita kita sendiri?

Namun, di tengah semua kegelapan ini, masih ada harapan. Harapan itu ada pada anak-anak muda yang mulai mempertanyakan sistem, pada guru-guru yang diam-diam mencoba metode baru di kelasnya, pada komunitas-komunitas kecil yang merancang program pendidikan alternatif. Harapan itu juga ada pada kesadaran bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa kita salah.

Pendidikan di Indonesia tidak butuh tambalan, tetapi revolusi. Revolusi yang dimulai dari keberanian untuk membangun sistem yang berakar pada budaya, tetapi terbuka pada dunia. Sistem yang menghargai kreativitas dan pemikiran kritis, bukan sekadar hafalan. Sistem yang tidak hanya menciptakan pekerja, tetapi manusia yang mampu mencipta, bertanya, dan bermimpi.

Jika pendidikan adalah cermin bangsa, maka mari kita bertanya: apakah kita puas dengan bayangan yang kita lihat? Ataukah ini saatnya kita menghancurkan cermin itu, dan menciptakan gambaran baru tentang diri kita? Sebuah gambaran yang tidak hanya mencerminkan siapa kita sekarang, tetapi siapa kita ingin menjadi.





Apakah pendidikan kita diciptakan diskriminatif? Tidak sama sekali!

AI NURHIDAYAT | *PRAKTISI PENDIDIKAN*

Di luar pendidikan pesantren maupun pendidikan berbasis budaya lokal, pendidikan tidak sesadis masa kolonial. Praktik pendidikan setelah masuk era kolonial hanya melayani kaum elit. Hanya kalangan tertentu yang mendapatkan keistimewaan belajar di sekolah dengan fasilitas yang diakui, dilindungi dan dijamin oleh pemerintah.

Perjalanan sejarah tentu menunjukkan pendidikan dasar pada akhirnya diberikan kepada rakyat biasa dengan hanya mempelajari kemampuan dasar. Untuk mencapai pendidikan sampai level tinggi, perlu kecerdasan khusus. Hanya siswa yang dianggap pintar yang dapat peluang ke level lanjut. Itupun tetap harus memiliki keistimewaan kelas.

Kita terus menerus bicara tentang pendidikan universal agar setiap jiwa memiliki peluang yang sama tanpa diskriminasi. Bahkan kita memegang prinsip demokratis dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Tapi lantaran tradisi konsistensi, pada praktiknya negara tidak mampu mewujudkannya.

Diskriminasi itu hadir mana kala ada siswa yang masuk sekolah harus terganjal aksesnya lantaran berbeda kemampuan keuangan. Pada beberapa kasus, karena faktor agama atau etnis.

Hal diskriminatif lainnya terdapat pada lembaga pendidikan yang didukung penuh oleh negara, disitimewakan dan berlimpah akses, hanya orang tertentu yang diseleksi saja. Praktik semacam itu, kini tak surut. Pemerintah malah merencanakan pembuatan sekolah khusus itu. Sekolah yang sudah pasti diakses oleh siswa yang sebelumnya mendapatkan keistimewaan.



Pelajaran terpenting periode menteri 2019-2024. Program beasiswa yang mensyaratkan bahasa Inggris, tentu hanya dapat diikuti kelompok keluarga tertentu saja yang berkemampuan membayar kursus anak mereka. Jelas, ini adalah praktik melanggar diskriminasi.

Persoalan pendidikan yang diskriminatif ini langgeng lantaran dilanggengkan oleh negara. Inisiatif mengistimewakan sekolah tertentu di tengah kebuntuan memenuhi kebutuhan dasar sekolah-sekolah negeri dan swasta. Untuk menyediakan fasilitas dasar sekolah, kerap berdalih tak cukup anggaran. Sementara jor-joran sekolah-sekolah khusus dibangun.

Hal ini seperti bertepuk tangan untuk segelintir orang. Dan tepuk tangan ini bagi lebih banyak lainnya terdengar seperti ejekan. Hampir tak jauh beda dengan kritik Ki Hadjar Dewantara dalam tulisannya “Seandainya Aku Seorang Belanda” saat negeri jajahan dipaksa merayakan ulang tahun kerajaan Belanda dengan biaya sendiri. Dipaksa terlihat bahagia padahal nasibnya menderita.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hanya orang tertentu saja yang difasilitasi negara untuk melanggar status quo. Sisanya, tidak dilayani dengan dalih anggaran tradisi.

A portrait of a middle-aged man with a shaved head and glasses, smiling broadly. He is wearing a white button-down shirt and has his hands clasped in front of him. A black watch is visible on his left wrist. The background is a dark, textured surface. A semi-transparent grey box is overlaid on the lower part of the image, containing the text.

Capt Meki F Nawwipa: Guru Anak-anak Papua dan Bangsa Indonesia

Sekolahkan ratusan bahkan ribuan anak Papua

Meki Fritz Nawipa adalah sosok inspiratif dari Papua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memajukan pendidikan anak-anak Papua. Sejak menjabat sebagai Bupati Paniai, ia telah menggagas program “Paniai Untuk Semua” yang di dalamnya terdapat beasiswa untuk ratusan bahkan ribuan anak untuk sekolah dari jenjang SD sampai dengan Universitas. Ia telah menginisiasi berbagai program untuk memastikan bahwa anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



Salah satu langkah nyata yang diambil oleh Meki Nawipa adalah mengirimkan ratusan siswa dari Papua Tengah untuk menempuh pendidikan di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta. Bahkan, beberapa siswa juga dikirim ke luar negeri, termasuk Amerika Serikat, untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen beliau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Atas kontribusinya tersebut, rasanya sangat layak bilamana beliau disebut sebagai guru bagi anak-anak Papua, bahkan bangsa Indonesia.





POLICY BRIEF

Nomor: 001- Maret 2025

Membangun Laboratorium Manusia Baru Papua Tengah: Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan untuk Transformasi SDM

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia dengan tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Selain itu, Pasal 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan adil, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pada Pasal 4, disebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Undang-undang ini juga membuka ruang bagi berbagai pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga independen—untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kehadiran laboratorium yang akan menjadi

Namun, hingga saat ini, realitas pendidikan di Papua Tengah masih jauh dari harapan. Rendahnya angka partisipasi sekolah, minimnya jumlah tenaga pengajar, kurangnya akses ke infrastruktur pendidikan, serta rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi tantangan yang terus berulang. Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk beasiswa, peningkatan gaji guru, serta pembangunan sekolah di daerah terpencil, perubahan signifikan belum terasa. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Papua Tengah tidak hanya membutuhkan lebih banyak intervensi, tetapi juga strategi yang berbasis data dan riset yang mendalam agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Ringkasan Eksekutif

Pendidikan di Papua Tengah menghadapi tantangan besar, seperti angka putus sekolah tinggi, minimnya guru dan fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan. Upaya pemerintah, seperti pemberian beasiswa dan pembangunan sekolah, belum menunjukkan hasil signifikan.

POLICY BRIEF PAPUA TENGAH

Membangun Laboratorium Manusia Baru Papua Tengah: Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan untuk Transformasi SDM

Konstitusi Indonesia dengan tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Selain itu, Pasal 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan adil, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.



Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pada Pasal 4, disebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Undang-undang ini juga membuka ruang bagi berbagai pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga independen—untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kehadiran laboratorium yang akan menjadi pusat riset dan inovasi pendidikan di Papua Tengah ini bukan hanya merupakan inisiatif yang relevan, tetapi juga sejalan dengan semangat konstitusi dan sistem pendidikan nasional.

Namun, hingga saat ini, realitas pendidikan di Papua Tengah masih jauh dari harapan. Rendahnya angka partisipasi sekolah, minimnya jumlah tenaga pengajar, kurangnya akses ke infrastruktur pendidikan, serta rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi tantangan yang terus berulang. Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk beasiswa, peningkatan gaji guru, serta pembangunan sekolah di daerah terpencil, perubahan signifikan belum terasa. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Papua Tengah tidak hanya membutuhkan lebih banyak intervensi, tetapi juga strategi yang berbasis data dan riset yang mendalam agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.





SERIAL DISKUSI

ARAH PENDIDIKAN KITA

BELAJAR DARI PENGALAMAN MEKI NAWIPA

WAKTU DAN TEMPAT

- Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 14.00-21.00 WIB di Jakarta
- Lokasi Kegiatan: "YELLO Hotel Harmoni Jakarta" Jl. Hayam Wuruk No.6, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ruang Rapat Power Up Lantai 8
- Pembahas: Ai Nurhidayat, S.IKom
Irfan Ilimi, S.Hum., M.Pd.
Indah Riadani Hapsarie, S.IKom
Gina Ainun Nurhidayati, S.Pd.
Rendi Stiadi, S.Pd.
Anjar Prasetyo, S.Pd.
Nurul Hidayat, S.Fil.

NARASUMBER UTAMA

Tokoh Papua yang selalu memperjuangkan kesetaraan orang Papua dan pembawa semangat kebangsaan.

Dengan kemampuannya sebagai orang Papua pertama yang menjadi pilot, menunjukkan kemampuan kecerdasan orang Papua. Selain membuka akses pada berbagai jenjang pendidikan, beliau meyakini melalui pendidikan, mentalitas bisa terbangun dengan saling berbagi daya.

Sebagai patriot, Mekki Nawipa selalu konsisten memperjuangkan orang Papua untuk dapat duduk sejajar dengan kawan sebangsa.



Jika skema ini berhasil diterapkan, beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:

- Peningkatan angka partisipasi sekolah: Masyarakat semakin percaya pada sistem pendidikan dan anak-anak lebih termotivasi untuk bersekolah.
- Metode Pembelajaran yang Lebih Relevan: Pendidikan lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Papua Tengah.
- Guru yang lebih berkualitas: Guru-guru mendapatkan pelatihan berbasis riset sehingga lebih siap menghadapi tantangan dalam pengajaran.
- Kebijakan pendidikan yang lebih efektif: Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar asumsi.
- Papua Tengah sebagai model pendidikan inovatif: Jika sukses, skema ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan berbasis riset.



POLICY BRIEF JAWA BARAT

Revitalisasi SMK sebagai Panggilan Jiwa: Solusi Berkelanjutan Mengatasi Pengangguran dan Mewujudkan Jabar Istimewa

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Agustus 2024 tercatat sebesar 6,75%, menempati level tertinggi tingkat nasional meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,44%. Angka ini mencerminkan bahwa dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja, sekitar 5-7 orang masih menganggur. Namun, permasalahan yang lebih mendalam terlihat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mencatat TPT tertinggi, yaitu 9,01%.



Pendidikan vokasi di Indonesia selama ini kerap dimaknai secara sempit sebagai pembelajaran keterampilan teknis untuk memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, SMK seringkali hanya berfungsi sebagai pabrik tenaga kerja yang mengikuti tren industri sesaat, tanpa membangun fondasi keilmuan dan karakter kuat bagi peserta didiknya. Padahal, jika merujuk pada akar katanya, istilah vokasi berasal dari bahasa Latin *vocatio*, yang berarti panggilan jiwa. Konsep ini lebih dari sekadar pelatihan keterampilan teknis; ia menekankan kesadaran mendalam akan profesi, refleksi terhadap makna pekerjaan, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.



Salah satu kelemahan dari pendekatan pendidikan vokasi yang hanya berfokus pada keselarasan dengan industri adalah sifat dunia kerja yang sangat dinamis dan penuh disrupsi. Banyak lulusan SMK yang dipersiapkan untuk industri tertentu justru kehilangan daya saing ketika industri tersebut mengalami perubahan atau digantikan oleh teknologi baru. Sebagai contoh industri manufaktur mengalami pergeseran besar akibat otomatisasi dan robotika. Banyak pekerjaan yang dahulu dilakukan secara manual kini digantikan oleh mesin. Jika SMK hanya berfokus pada keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan manual, lulusannya akan sulit bersaing dalam era industri 4.0.



Revitalisasi SMK sebagai panggilan jiwa tidak hanya berbicara tentang reformasi pendidikan, tetapi sebuah perubahan fundamental dalam cara kita memandang vokasi. Jika SMK hanya mengejar keselarasan dengan industri yang terus berubah, lulusan akan selalu tertinggal. Namun, jika SMK melahirkan individu yang reflektif, inovatif, dan memiliki *life skills* kuat, mereka akan relevan sepanjang masa.

Inilah saatnya bagi Jawa Barat untuk memimpin perubahan dengan menanamkan paradigma baru dalam pendidikan vokasi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, SMK di Jawa Barat tidak lagi mencetak tenaga kerja handal semata, melainkan juga generasi pencipta lapangan kerja dan inovator masa depan.



makna vigora

VIGORA ADALAH KOMBINASI DARI:

"VIDYA" (ILMU, PENGETAHUAN DALAM BAHASA SANSKERTA)

"AGORA" (TEMPAT DISKUSI DAN PERTUKARAN GAGASAN DALAM BAHASA YUNANI)

MAKNA VIGORA:

"RUANG UNTUK BERBAGI ILMU DAN KEBIJAKSANAAN" ATAU "PUSAT PERTEMUAN ILMU PENGETAHUAN".

SELAIN ITU, "VIGORA" JUGA TERDENGAR SEPERTI "VIGOR" DALAM BAHASA INGGRIS, YANG BERARTI ENERGI, SEMANGAT, DAN KEKUATAN, SEHINGGA DAPAT MENCERMINKAN DINAMIKA DAN SEMANGAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN RISET.

Pelatihan Guru dan Siswa



Sharing Happiness



Ayo Kontribusi di ERC Indonesia.....

**KIRIMKAN KARYAMU
MELALUI:**

Email: ercindonesia4@gmail.com

**JADI BAGIAN ATAU
BERMITRA:**

Kontak: 081932410966

